



PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 87 Gedangan Sidoarjo - 61253

Telp / Fax : 031 8671763 / 99681347

Website : www.dilmilti3-surabaya.go.id ; Email : milti.surabaya@gmail.org

KATA PENGANTAR

Dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, Eksistensi Peradilan Militer dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang Terdakwanya Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah Hukumnya yang dimintakan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Program Kerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat terlaksana dengan didukung anggaran (DIPA) yang dijabarkan dalam RKA-KL Tahun 2024 dan diarahkan untuk mewujudkan organisasi lembaga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Profesional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Diharapkan Program Kerja Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sidoarjo, Desember 2023
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



KIRTO
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Maksud dan Tujuan	3
E. Sasaran	3
F. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
G. Landasan Pemikiran	4
BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung	6
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	8
BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA	10
A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	10
B. Program Dukungan Manajemen	12
BAB IV PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. SARAN	18
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kedudukan Peradilan Militer Tinggi III Surabaya

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman tentram dan tertib.

Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Kostitusi”.

Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (*One Roof System*).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 memerintahkan pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara organisasi Peradilan Militer sudah di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun Struktur Organisasinya mengacu kepada Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K”

tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer dan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkedudukan di Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh wilayah di Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Kepulauan Ambon dan Ternate serta Kepulauan Papua.

2. Kondisi saat ini

Hingga saat ini *jusitissabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinamis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2024 menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi melaksanakan proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, meningkatkan kualitas pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). RKT ini harus didukung anggaran dalam DIPA kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Tahun 2024 yang meliputi:

- a. Program Dukungan Manajemen.
- b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;

B. Visi dan Misi

1. Visi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai visi : “Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”.

2. Misi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang terdakwa berpangkat Mayor ke atas dan merupakan pengadilan tingkat banding untuk terdakwa yang berpangkat Kapten ke bawah yang perkaranya diputus dan dimintakan banding oleh Pengadilan Militer yang berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan;
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ini dimaksudkan sebagai gambaran / acuan apa dan bagaimana serta sejauh mana Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat melaksanakan realisasi anggaran selama 1 (satu) tahun sebagai instrumen sistem penggerak (*system and enabler*) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

2. Tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Program Kerja ini adalah pedoman bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (*output*).

E. Sasaran

Hasil (*result*) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2024 sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan sasaran umum meliputi :

1. Peningkatan proses dan percepatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dan Sumber daya Manusia (SDM).

F. Ruang Lingkup dan Sistematika

1. Ruang lingkup.

Program kerja ini dibatasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada “Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035” dan tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh.

2. Sistematika.

Adapun sistematika dalam penulisan Program kerja ini adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika dan Landasan Pemikiran.

b. Bab II Tugas Pokok dan Faktor yang Mempengaruhi.

Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok dan fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja.

c. Bab III Pokok-Pokok Program Kerja.

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan dan target pencapaiannya.

d. Bab IV Penutup.

Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

G. Landasan Pemikiran.

Dasar pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan program kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan

secara komprehensif mengenai Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

3. DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya APBN Tahun Anggaran 2024

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. DIPA juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Program kerja ini berpedoman dengan DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya APBN Tahun Anggaran 2024.

BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di bidang fungsi teknis yudisial (teknis yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personel dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personel disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

3. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. Pengadaan;
- d. Penggunaan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pengamanan dan pemeliharaan;

- g. Penilaian;
- h. Penghapusan;
- i. Pemindahtanganan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut :

- a. Fase perencanaan,
yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b. Fase pengadaan,
yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c. Fase pengoperasian dan pemeliharaan,
yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- d. Fase penghapusan (*disposal*),
yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan, namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

5. Transparansi Peradilan.

Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

6. Fungsi Pembinaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun anggaran 2024 melakukan pembinaan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- a. Kegiatan pembinaan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang / bagian yang melaksanakan pembinaan. Jalannya tugas dan tanggung

jawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

- b. Pembinaan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pembina bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
 - 1) Hakim Pembina Bidang Administrasi Persidangan.
 - 2) Hakim Pembina Bidang Administrasi Umum.
 - 3) Hakim Pembina Bidang Administrasi Keuangan.
 - 4) Hakim Pembina Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi kepada masyarakat

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pembina bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan hasil pembinaan dilaporkan kepada Kadilmilti.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 065-A/SKB/IX/2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/420/IX/ 2004 tanggal 1 September 2004 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 seharusnya organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disesuaikan dengan Orpros Mahkamah Agung RI, namun hingga saat ini baru ada pemisahan antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi yang baru diatur mengenai Kesekretariatan dan Kepaniteraan sudah diatur secara rinci, dan saat ini untuk pejabat Kepaniteraan sudah terisi sepenuhnya, dan pejabat Kesekretariatan juga sudah terisi penuh. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas, karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

2. Sumber Daya Manusia Terbatas.

Saat ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah memiliki 11 (sebelas) personel Hakim Militer Tinggi termasuk Kadilmilti dan Wakadilmilti. Kekurangan personel anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personel Militer dan PNS staf Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada umumnya memiliki tugas tambahan di samping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Barang Milik Negara (IKBMN), pelayanan

informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/SIPP, admin webmin/portal, admin sistem kepegawaian).

3. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan teknologi informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI.

BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

Pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya didukung oleh anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar Rp. 10.821.920.000,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar Rp. 10.412.490.000,- dan DIPA Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung sebesar Rp. 409.430.000,-.

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dari Dirjen Badilmiltun MARI Nomor: SP DIPA-005.05.2.663301/2024 tanggal 24 November 2023, jenis program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 409.430.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mempunyai Rincian Output (RO) sebagai berikut:

1. Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	Rp. 75.000.000,-
2. Penyelesaian Perkara TK Pertama	Rp. 31.300.000,-
3. Penyelesaian Perkara TK Banding	Rp. 60.480.000,-
4. Sidang di luar gedung pengadilan	Rp. 242.650.000,-

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara.

Dalam tahun 2024, target penyelesaian perkara adalah sebanyak 267 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2023 sebanyak 27 perkara dan target perkara tahun 2024 sebanyak 240 perkara, yang diklasifikasikan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Perkara Tingkat Pertama berjumlah 40 Perkara
 - 1) Penyelesaian Triwulan Pertama : 10 Perkara
 - 2) Penyelesaian Triwulan Kedua : 10 Perkara
 - 3) Penyelesaian Triwulan Ketiga : 10 Perkara
 - 4) Penyelesaian Triwulan Keempat : 10 Perkara
- b. Perkara Tingkat Banding berjumlah 160 Perkara
 - 1) Penyelesaian Triwulan Pertama : 40 Perkara
 - 2) Penyelesaian Triwulan Kedua : 40 Perkara
 - 3) Penyelesaian Triwulan Ketiga : 40 Perkara
 - 4) Penyelesaian Triwulan Keempat : 40 Perkara

- c. Perkara pelanggaran lalu lintas berjumlah 5 perkara
 - 1) Penyelesaian Triwulan Pertama : 1 Perkara
 - 2) Penyelesaian Triwulan Kedua : 2 Perkara
 - 3) Penyelesaian Triwulan Ketiga : 1 Perkara
 - 4) Penyelesaian Triwulan Keempat : 1 Perkara
- d. Perkara yang dimintakan upaya hukum berjumlah 50 perkara
 - 1) Tingkat Banding : 25 Perkara
 - 2) Tingkat Kasasi : 21 Perkara
 - 3) Peninjauan Kembali : 4 Perkara

2. Pelaksanaan Sidang Keliling (*Detasering*).

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki wilayah yang sangat luas, serta keterbatasan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maka kegiatan pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan apabila perkara tingkat pertama yang ditangani sangat sulit menghadirkan saksi-saksi kunci serta barang-barang bukti ke persidangan yang dilaksanakan di Surabaya, dan perkara tingkat banding yang masih memerlukan pendalaman terhadap beberapa keterangan saksi. Wilayah tempat dilaksanakannya sidang keliling tergantung tempat kejadian (*locus delictie*) perkara dan kesatuan tempat bertugas terdakwa (vide pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

3. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara.

Dalam tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melakukan upaya-upaya untuk terlaksananya peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

- a. Kadilmilti III Surabaya melakukan koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dengan institusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI.
- b. Kadilmilti III Surabaya melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja hakim dan panitera.
- c. Kadilmilti III Surabaya melakukan evaluasi penyelesaian minutasasi perkara yang telah diputus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d. Kadilmilti III Surabaya melakukan perencanaan sidang keliling dan menyelesaikan target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititikberatkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan. Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat luas (menonjol) seperti

perkara psikotropika, narkoba dan perkara-perkara lainnya serta perkara yang terdakwanya ditahan.

Rencana kegiatan dan rencana realisasi untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dirjen Badilmiltun MA RI tahun anggaran 2024 terlampir.

B. Program Dukungan Manajemen

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Nomor : DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 24 November 2023, dengan Rincian Output (RO) sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran

Jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 9.085.490.000,- (sembilan milyar delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan komponen:

a. Gaji dan Tunjangan.

Jumlah alokasi biaya Rp. 6.603.565.000 (enam milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini di lakukan secara terpusat, sebagai konsekuensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki tugas pembinaan personel terhadap anggota Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang jumlah personelnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang terdiri atas : Personel Militer sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian 11 (sebelas) orang Hakim, 6 (enam) Pamen non hakim, 1(satu) Pama, 7 (tujuh) Ba, 1(satu) Ta dan 5 (lima) Personel BP, Personel PNS sebanyak 12 (dua belas) orang, Personel PPPK 2 (dua) orang dan Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 11 (sebelas) orang. Pembinaan personel dilakukan melalui :

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kuantitas.

Penempatan Personel di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sampai saat ini belum ada DSP (Daftar Susunan Personel), jika dilihat secara kuantitas saat ini jumlah personel untuk majelis hakim sudah terpenuhi, dimana Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diwakili oleh 11 (sebelas) Hakim Tinggi atau Kimmilti termasuk Kadilmilti dan Wakadilmilti. Tenaga teknis dan non teknis bila dilihat dari struktur organisasi yang terbaru sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka

Kepaniteraan dan Kesekretariatan saat ini hanya diawaki oleh personel dengan jumlah :

a) Kepaniteraan diwakili personel dengan jumlah 11 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- Panitera : 1 orang
- Panmud Pidana : 1 orang
- Staf : 2 orang, seharusnya 5 orang
- Panmud Hukum : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Panmud TUM : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Panitera Pengganti : 1 orang,

b) Kesekretariatan diawaki personel dengan jumlah 22 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- Sekretaris : 1 orang
- Kabag RenPeg : 1 orang
- Kasubbag Renprog : 1 orang
- Staf/P3K/PPK : 3 orang
- Kasubbag : 1 orang
- Kepegawaian _ TI
- Staf : 3 orang
- Kabag Umum dan : 1 orang
- Keuangan
- Kasubbag TURT : 1 orang
- Staf : 6 orang
- Kasubbag Keu dan : 1 orang
- Pelaporan
- Staf : 3 orang

Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan satker atas, sedangkan jumlah untuk Tenaga PPNN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) adalah tetap mengingat terbatasnya anggaran yang dapat disediakan dan adanya instruksi dari MA RI untuk tidak menambah PPNN.

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam rangka melaksanakan pembinaan personel baik personel Militer dan PNS. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan

militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan kualitas SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan di bidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

a) Administrasi Perkara.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/I/2001 dan SOP Penyelesaian Perkara. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meliputi :

- (1) Pola tentang Register Perkara
- (2) Pola tentang Keuangan Perkara
- (3) Pola tentang Pelaporan Perkara
- (4) Pola tentang Kearsipan Perkara

b) Administrasi Umum.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Bagian Umum dan Keuangan maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

(1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- (b) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- (c) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- (d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

(e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri dari Subbagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

(2) Bagian Umum dan Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- (b) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- (c) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (d) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- (e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

c) Pembinaan Tenaga Teknis.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berupaya untuk meningkatkan pembinaan personel teknis terhadap hakim dan panitera melalui :

- (1) Pembinaan teknis hakim berupa diskusi penyelesaian hambatan penyelesaian perkara di lapangan.
- (2) Pembinaan teknis kepaniteraan terutama penyelesaian minutasi perkara.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Jumlah alokasi biaya Rp. 2.481.925.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana pengadilan yang ada dan kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak. Perlu kita sadari sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparat peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.

2) Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas pengelola BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dengan kemudian melaksanakan laporan rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan sehingga tertib administrasi.

3) Penyimpanan dan pengelolaan informasi secara *hard copy* (arsip) maupun *soft copy* (*file*) oleh petugas administrasi tata usaha. Penyimpanan arsip diarahkan ke arah elektronik arsip (Sistem Aplikasi e-arsip) dengan sedikit mungkin menggunakan kertas (*paper less*), namun setiap saat tetap dapat ditemukan bahkan dapat diakses publik.

4) Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (*interconnected*). Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat akan mendorong Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.

5) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi *real time* ke *portal website* <https://dilmilti3-surabaya.go.id> yaitu:

- a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP,
- b) Sistem kearsipan/e-arsip dilmilti,
- c) Sistem plasma /informasi dilmilti;
- d) Sistem SMS Gateway Pengaduan.

6) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke Satker-Satker Pengadilan Militer jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparat pengadilan.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pelaksanaan program ini dibiayai dengan DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Nomor : DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 24 November 2023, dengan jenis komponen berupa Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan yaitu renovasi gedung kantor, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pengadaan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparan dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-4 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan tersebut dapat dilihat di <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.

Rencana kegiatan dan rencana realisasi untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi MA RI tahun anggaran 2024 terlampir.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pada tahun 2024 akan melaksanakan program kerja yang meliputi :
 - a. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum
 - b. Program Dukungan Manajemen
2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2024 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan.

B. SARAN

Agar program kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan, maka di harapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak- pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2024, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (teknis yudisial) dan fungsi manajemen pendukungnya (non teknis yudisial) sehingga tujuan dan sasaran (*out put*) setiap kegiatan tercapai.

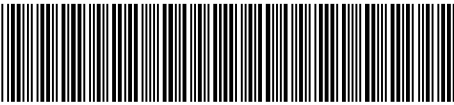
Sidoarjo, Desember 2023
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



KIRTO.
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN





SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.663300/2024

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 - 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 - 4. Kode>Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
 - Sebesar : Rp. 10.412.490.000 (SEPULUH MILIAR EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	10.412.490.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 10.412.490.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

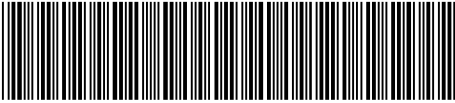
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024



DS:7410-3024-1627-5001

Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10.412.490.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	1.327.000.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	9.085.490.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7410-3024-1627-5001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

								Halaman : I A. 1
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen					10.412.490.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					1.327.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			1.079,00	Unit, m2, Paket	1.327.000.000
Rincian Output	:	01 EBB.971	Layanan Prasarana Internal			1079.00	m2	1.327.000.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					9.085.490.000
	:	1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)					
	:	2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					
	:	3. 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)					
	:	4. 04	Kualitas Pelayanan Informasi Publik					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.085.490.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran			1.00	Layanan	9.085.490.000

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
I B. SUMBER DANA



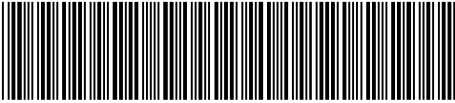
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	10.412.490.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	10.412.490.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7410-3024-1627-5001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
Kewenangan : (KD)

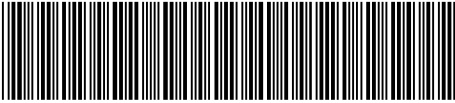
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	6.603.565	2.481.925	1.327.000	-	-	10.412.490	05 . 51	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.603.565	2.481.925	1.327.000	-	-	10.412.490		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	1.327.000	-	-	1.327.000		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	-	1.327.000	-	-	1.327.000		
01	RM	-	-	1.327.000	-	-	1.327.000		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.603.565	2.481.925	-	-	-	9.085.490		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	6.603.565	2.481.925	-	-	-	9.085.490		
01	RM	6.603.565	2.481.925	-	-	-	9.085.490	135	
JUMLAH		6.603.565	2.481.925	1.327.000	-	-	10.412.490		

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7410-3024-1627-5001

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	2.084.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.489	10.412.490
		BELANJA PEGAWAI	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.463	6.603.565
		BELANJA BARANG	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	207.026	2.481.925
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	1.327.000	0	0	0	0	0	0	1.327.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	1.327.000	0	0	0	0	0	0	1.327.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	1.327.000	0	0	0	0	0	0	1.327.000
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.091	757.489	9.085.490
005.01.WA.1071	005.01.WA.6986	51 BELANJA PEGAWAI	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.282	550.463	6.603.565
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	206.809	207.026	2.481.925

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
IV A. B L O K I R



DS:7410-3024-1627-5001

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663300] PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.663300/2024
IV B. C A T A T A N



DS:7410-3024-1627-5001

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663300] PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB(005)MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG(01)Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA(663300)PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

ALOKASIRp. 10,412,490,000

P_Awal_2024

24 November 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			10,412,490,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1,327,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1079.0 Unit, m2, Paket		1,327,000,000	
	Lokasi : KOTA SURABAYA				
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1079.0 m2		1,327,000,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			1,327,000,000	
A	Renovasi Gedung Kantor			1,327,000,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.135-Surabaya II)			1,327,000,000	RM
	- Biaya Pengelola Kegiatan	1.0 KEG	60,000,000	60,000,000	
	- Konsultan Pengawas	1.0 KEG	80,000,000	80,000,000	
	- Konsultan Perencana	1.0 KEG	100,000,000	100,000,000	
	- Konstruksi Fisik	1079.0 M2	1,007,415	1,087,000,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			9,085,490,000	
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		9,085,490,000	
	Lokasi : KOTA SURABAYA				
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		9,085,490,000	
001	Gaji dan Tunjangan			6,603,565,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			6,603,565,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.135-Surabaya II)			714,761,000	RM
	- Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 THN	238,303,000	238,303,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	288,392,000	288,392,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke-13)	1.0 BLN	94,033,000	94,033,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke-14/THR)	1.0 BLN	94,033,000	94,033,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.135-Surabaya II)			21,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	17,000	17,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke-13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke-14/THR)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.135-Surabaya II)			34,277,000	RM
	- Gaji Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	24,379,000	24,379,000	
	- Gaji Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	4,949,000	4,949,000	
	- Gaji Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji Ke 14)	1.0 BLN	4,949,000	4,949,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			15,450,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	13,242,000	13,242,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	1,104,000	1,104,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.0 BLN	1,104,000	1,104,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			86,030,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	73,740,000	73,740,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	6,145,000	6,145,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.0 BLN	6,145,000	6,145,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			105,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	75,000,000	75,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	15,000,000	15,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.0 BLN	15,000,000	15,000,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			93,402,000	RM
	- Belanja Tunj. Pph PNS	1.0 THN	90,402,000	90,402,000	
	- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	1,500,000	1,500,000	
	- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.0 BLN	1,500,000	1,500,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			25,233,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	25,233,000	25,233,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			94,808,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	94,808,000	94,808,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.135-Surabaya II)			10,866,000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1.0 THN	7,170,000	7,170,000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 13)	1.0 BLN	1,848,000	1,848,000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.0 BLN	1,848,000	1,848,000	
511224	<u>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</u> (KPPN.135-Surabaya II)			4,874,100,000	RM
	- Belanja Tunj Kepala [1 Org x 14 bln]	14.0 OB	40,200,000	562,800,000	
	- Belanja Tunj Waka [1 Org x 14 bln]	14.0 OB	36,500,000	511,000,000	
	- Belanja Tunj Kimmilti [9 Org x 14 bln]	126.0 OB	29,100,000	3,666,600,000	
	- Belanja Tunj Kepaniteraan [1 Org x 14 bln]	14.0 OB	9,550,000	133,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.135-Surabaya II)			490,000,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	1.0 THN	408,000,000	408,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-13)	1.0 BLN	41,000,000	41,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-14)	1.0 BLN	41,000,000	41,000,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			1,480,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			4,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	350,000	350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	350,000	350,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			4,054,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	3,476,000	3,476,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	289,000	289,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	289,000	289,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.135-Surabaya II)			8,400,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,481,925,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran</i>			<i>631,543,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.135-Surabaya II)			579,743,000	RM
	- Pramubhakti [6 org x 12 bln]	72.0 OB	3,759,000	270,648,000	
	- Gaji ke-13 (THR) Pramubhakti [6 org x 1 bln]	6.0 OB	3,759,000	22,554,000	
	- Pengemudi [1 org x 12 bln]	12.0 OB	4,135,000	49,620,000	
	- Gaji ke-13 (THR) Pengemudi [1 org x 1 bln]	1.0 OB	4,135,000	4,135,000	
	- Satpam [4 org x 12 bln]	48.0 OB	4,135,000	198,480,000	
	- Gaji ke-13 (THR) Satpam [4 org x 1 bln]	4.0 OB	4,135,000	16,540,000	
	- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
	- Air Minum / Galon	12.0 BLN	650,000	7,800,000	
	- Biaya Penjilidan	1.0 THN	5,066,000	5,066,000	
	- Jamuan Tamu	12.0 BLN	75,000	900,000	
	- Retribusi Sampah	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.135-Surabaya II)			5,000,000	RM
	- Spanduk/Banner	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Kegiatan Insidentil (Cendramata Masa Reses DPR, Kunjungan KY, Perguruan Tinggi-Mahasiswa Magang)	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.135-Surabaya II)			46,800,000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai 40 Orang) [0 org x 0 thn]	1.0 THN	46,800,000	46,800,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			852,700,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.135-Surabaya II)			141,000,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BLN	11,000,000	132,000,000	
	- Langganan Lisensi Antivirus	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Lisensi Video Conference	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.135-Surabaya II)			60,000,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.135-Surabaya II)			38,400,000	RM
	- Langganan Telepon	12.0 BLN	3,200,000	38,400,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.135-Surabaya II)			10,800,000	RM
	- Langganan Air / Tangki Air	12.0 BLN	900,000	10,800,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.135-Surabaya II)			602,500,000	RM
	- Sewa Mesin Fotocopy Sewilayah Dilmilti III Sby [9 UNIT x 1 THN]	9.0 U/THN	66,000,000	594,000,000	
	- Sewa Web Hosting	1.0 THN	8,500,000	8,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(663300)
Rp. 10,412,490,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Pemeliharaan Kantor			521,950,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.135-Surabaya II)			219,620,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor [1499 m2 x 1 thn]	1499.0 M2/TH	125,000	187,375,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor [2437 m2 x 1 thn]	2437.0 M2/TH	10,000	24,370,000	
	- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor [90 m2 x 1 thn]	90.0 M/TH	75,000	6,750,000	
	- Pemeliharaan Rumah Genzet [9 m2 x 1 thn]	9.0 M2/TH	125,000	1,125,000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.135-Surabaya II)			12,000,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Dinas [120 m2 x 1 thn]	120.0 M2/TH	100,000	12,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.135-Surabaya II)			290,330,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 [5 unit x 1 thn]	5.0 U/THN	27,500,000	137,500,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan (BBM HiAce)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan Sound System [1 unit x 1 thn]	1.0 U/THN	1,000,000	1,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin FotoCopy [1 unit x 1 thn]	1.0 U/THN	5,000,000	5,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 [5 unit x 1 thn]	5.0 U/THN	4,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan PC / CPU [31 unit x 1 thn]	31.0 U/THN	530,000	16,430,000	
	- Pemeliharaan Laptop / Notebook [25 unit x 1 thn]	25.0 U/THN	450,000	11,250,000	
	- Pemeliharaan Printer [41 unit x 1 thn]	41.0 U/THN	300,000	12,300,000	
	- Pemeliharaan Server	2.0 U/THN	2,500,000	5,000,000	
	- Pemeliharaan CCTV	2.0 U/THN	750,000	1,500,000	
	- Pemeliharaan AC Split [44 unit x 1 thn]	44.0 U/THN	300,000	13,200,000	
	- Pemeliharaan AC Standing [2 Unit x 1 THN]	2.0 U/THN	525,000	1,050,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor [48 Peg x 1 thn]	48.0 P/THN	75,000	3,600,000	
	- Pemeliharaan Genzet [1 unit x 1 thn]	1.0 U/THN	3,500,000	3,500,000	
	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput [2 unit x 1 thn]	2.0 U/THN	750,000	1,500,000	
	- Bahan Bakar Genzet [1 unit x 1 thn]	1.0 U/THN	2,500,000	2,500,000	
	- Bahan Bakar Kendaraan Sewa [2 unit x 1 thn]	2.0 U/THN	20,000,000	40,000,000	
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			78,262,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.135-Surabaya II)			22,150,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [27 org x 1 stel]	27.0 OS	550,000	14,850,000	
	- Pakaian Kerja Satpam [4 org x 1 stel]	4.0 OS	950,000	3,800,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubhakti [7 org x 1 stel]	7.0 OS	500,000	3,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.135-Surabaya II)			56,112,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 org x 12 bln]	12.0 OB	1,036,000	12,432,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 org x 12 bln]	12.0 OB	1,512,000	18,144,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 org x 12 bln]	12.0 OB	594,000	7,128,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 org x 12 bln]	12.0 OB	516,000	6,192,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 org x 12 bln]	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	- Honor Pengurus/Penyimpan BMN [1 org x 12 bln]	12.0 OB	250,000	3,000,000	
F	<u>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</u>			3,900,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.135-Surabaya II)			3,200,000	RM
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	2.0 KEG	700,000	1,400,000	
	- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [30 ORG x 2 KEG]	60.0 KEG	30,000	1,800,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.135-Surabaya II)			700,000	RM
	- Jasa Rohaniawan [1 org x 2 keg]	2.0 OK	350,000	700,000	
G	<u>Rapat Koordinasi Internal</u>			3,250,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.135-Surabaya II)			3,250,000	RM
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	5.0 KEG	350,000	1,750,000	
	- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [10 ORG x 5 KEG]	50.0 KEG	30,000	1,500,000	
H	<u>Konsultasi ke Pusat</u>			60,240,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.135-Surabaya II)			60,240,000	RM
	> Penelaahan Anggaran RKAKL			22,160,000	
	- Tiket [4 org x 1 keg]	4.0 OK	2,000,000	8,000,000	
	- Transport Riiil [4 org x 1 pp x 1 keg]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	- Penginapan [4 org x 2 hr x 1 keg]	8.0 OH	850,000	6,800,000	
	- Uang Harian [4 org x 3 hr x 1 keg]	12.0 OH	530,000	6,360,000	
	> Konsultasi Pimpinan ke Pusat			38,080,000	
	- Tiket [4 org x 2 keg]	8.0 OK	2,000,000	16,000,000	
	- Penginapan [4 org x 2 hr x 2 keg]	16.0 OH	850,000	13,600,000	
	- Uang Harian [4 org x 2 hr x 2 keg]	16.0 OH	530,000	8,480,000	
I	<u>Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DjPB/KPKNL</u>			3,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.135-Surabaya II)			2,400,000	RM
	- Transport [2 org x 12 keg]	24.0 OK	100,000	2,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.135-Surabaya II)			800,000	RM
	- Transport [2 org x 4 keg]	8.0 OK	100,000	800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663300) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
ALOKASI Rp. 10,412,490,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			67,680,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			67,680,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Tiket [3 org x 4 keg]	12.0 OK	2,000,000	24,000,000	
	- Tranport Riil [3 org x 1 pp x 4 keg]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Penginapan [3 org x 2 hr x 4 keg]	24.0 OH	900,000	21,600,000	
	- Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 keg]	36.0 OH	530,000	19,080,000	
L	Hak Dan Fasilitas Keuangan Hakim			259,200,000	
522141	Belanja Sewa			259,200,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [10 org x 12 bln]	120.0 OB	2,160,000	259,200,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



RENCANA KEGIATAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI _ DIPA 01
TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	73.740.000												
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 13)	6.145.000												
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 14/THR)	6.145.000												
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>	105.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	75.000.000												
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 13)	15.000.000												
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 14/THR)	15.000.000												
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>	93.402.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. Pph PNS	90.402.000												
	- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 13)	1.500.000												
	- Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.500.000												
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>	25.233.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. Beras PNS	25.233.000												
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>	94.808.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Uang Makan PNS	94.808.000												
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>	10.866.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. Umum PNS	7.170.000												
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 13)	1.848.000												
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji Ke 14/THR)	1.848.000												
511224	<u>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</u>	4.874.100.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj Kepala [1 Org x 14 bln]	562.800.000												
	- Belanja Tunj Waka [1 Org x 14 bln]	511.000.000												
	- Belanja Tunj Kimmilti [9 Org x 14 bln]	3.666.600.000												
	- Belanja Tunj Kepaniteraan [1 Org x 14 bln]	133.700.000												
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u>	490.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	408.000.000												
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-13)	41.000.000												
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (Ke-14)	41.000.000												
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>	37.070.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	31.776.000												
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2.647.000												
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2.647.000												
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u>	9.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000												
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.000												
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.000												
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u>	3.704.000												
	(KPPN.135-Surabaya II.)													
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.176.000												
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	264.000												
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	264.000												
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u>	1.480.000												

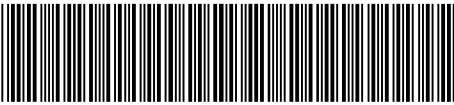
[illegible]

[illegible]

	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	1.400.000												
	- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [30 ORG x 2 KEG]	1.800.000												
522191	Belanja Jasa Lainnya	700.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Jasa Rohaniawan [1 org x 2 keg]	700.000												
G	Rapat Koordinasi Internal	3.250.000												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.250.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	1.750.000												
	- Kudapan (Snack) dan Makan Siang [10 ORG x 5 KEG]	1.500.000												
H	Konsultasi ke Pusat	60.240.000												
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.240.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	Penelaahan Anggaran RKAKL	22.160.000												
	- Tiket [4 org x 1 keg]	8.000.000												
	- Transport Riil [4 org x 1 pp x 1 keg]	1.000.000												
	- Penginapan [4 org x 2 hr x 1 keg]	6.800.000												
	- Uang Harian [4 org x 3 hr x 1 keg]	6.360.000												
	Konsultasi Pimpinan ke Pusat	38.080.000												
	- Tiket [4 org x 2 keg]	16.000.000												
	- Penginapan [4 org x 2 hr x 2 keg]	13.600.000												
	- Uang Harian [4 org x 2 hr x 2 keg]	8.480.000												
I	- Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DjPB/KPKNL	3.200.000												
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Transport [2 org x 12 keg]	2.400.000												
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Transport [2 org x 4 keg]	800.000												
K	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	67.680.000												
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.680.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Tiket [3 org x 4 keg]	24.000.000												
	- Transport Riil [3 org x 1 pp x 4 keg]	3.000.000												
	- Penginapan [3 org x 2 hr x 4 keg]	21.600.000												
	- Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 keg]	19.080.000												
L	Hak Dan Fasilitas Keuangan Hakim	259.200.000												
522141	Belanja Sewa	259.200.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [10 org x 12 bln]	259.200.000												

Sidoarjo, Desember 2023
Pengadain Militer Tinggi III Surabaya
Kuasa Pengguna Anggaran


ANWAR
KOLONEL CHK

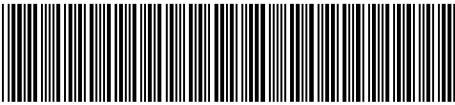


SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663301/2024

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3959-2940-1302-5891

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

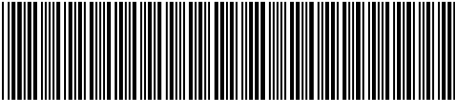
Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			409.430.000
Kegiatan	:	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			409.430.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer			
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer			
		4. 02	-			
		5. 02	Jumlah Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Militer			
		6. 03	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1058.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	75.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	4.00	kegiatan	75.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	200,00	Perkara, Berkas Perkara	91.780.000
Rincian Output	:	01	BCA.U02 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	160.00	Perkara	60.480.000
		02	BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	40.00	Perkara	31.300.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	20,00	Perkara, Berkas Perkara	242.650.000
Rincian Output	:	01	QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan (PN) Peradilan Militer	20.00	Perkara	242.650.000

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
I B. SUMBER DANA



DS:3959-2940-1302-5891

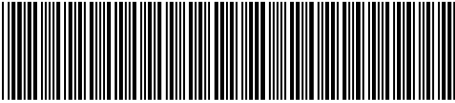
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	409.430.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	409.430.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3959-2940-1302-5891

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA
Kewenangan : (KD)

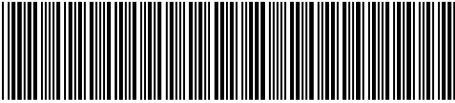
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663301	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	-	409.430	-	-	-	409.430	05 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	409.430	-	-	-	409.430		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	409.430	-	-	-	409.430		
1058.AEA	Koordinasi (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	75.000	-	-	-	75.000		
01	RM	-	75.000	-	-	-	75.000		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	91.780	-	-	-	91.780		
01	RM	-	91.780	-	-	-	91.780		
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	242.650	-	-	-	242.650		
01	RM	-	242.650	-	-	-	242.650	135	
JUMLAH		-	409.430	-	-	-	409.430		

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3959-2940-1302-5891

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (663301) PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

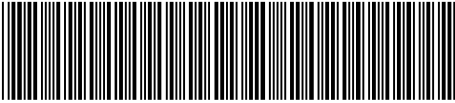
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663301	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.050	130.520	8.300	9.050	8.800	129.800	9.050	29.300	51.700	20.080	9.030	1.750	409.430
		BELANJA BARANG	2.050	130.520	8.300	9.050	8.800	129.800	9.050	29.300	51.700	20.080	9.030	1.750	409.430
		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	2.050	130.520	8.300	9.050	8.800	129.800	9.050	29.300	51.700	20.080	9.030	1.750	409.430
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.050	130.520	8.300	9.050	8.800	129.800	9.050	29.300	51.700	20.080	9.030	1.750	409.430

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
IV A. B L O K I R



DS:3959-2940-1302-5891

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663301] PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663301/2024
IV B. C A T A T A N



DS:3959-2940-1302-5891

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663301] PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

(005)

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG

(05)

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

UNIT KERJA

(663301)

PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

ALOKASI

Rp.

409,430,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			409,430,000	
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			409,430,000	
1058.AEA	Koordinasi[Base Line]	4.0 kegiatan		75,000,000	
	Lokasi : KOTA SURABAYA				
1058.AEA.001	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	4.0 kegiatan		75,000,000	
051	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan			75,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			75,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			75,000,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Tiket [3 org x 4 keg]	12.0 Ok	2,000,000	24,000,000	
	- Tranportasi Riil [3 org x 4 keg]	12.0 Ok	630,000	7,560,000	
	- Penginapan [3 org x 2 hr x 4 keg]	24.0 Oh	1,000,000	24,000,000	
	- Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 keg]	36.0 Oh	540,000	19,440,000	
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	200.0 Perkara, Berkas Perkara		91,780,000	
	Lokasi : KOTA SURABAYA				
1058.BCA.U02	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	160.0 Perkara		60,480,000	
051	Pencatatan Register Perkara Banding			22,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			22,400,000	
521211	Belanja Bahan			12,000,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	160.0 PKR	75,000	12,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			10,400,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Alat Tulis Kantor	160.0 PKR	65,000	10,400,000	
052	Minutasi			4,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,000,000	
521211	Belanja Bahan			4,000,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	160.0 PKR	25,000	4,000,000	
053	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju			30,080,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			30,080,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			30,080,000	RM
	(KPPN.135-Surabaya II)				
	- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan	160.0 PKR	188,000	30,080,000	
054	Pengiriman Surat Penahanan			4,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(05)

(663301)

Rp. 409,430,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.135-Surabaya II)			4,000,000	
	- Pengiriman Surat Penahanan ke Pengadilan Pengaju dan ke Rumah Tahanan Militer	160.0 PKR	25,000	4,000,000	
1058.BCA.U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	40.0 Perkara		31,300,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			6,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.135-Surabaya II)			3,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	40.0 PKR	75,000	3,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.135-Surabaya II)			3,000,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	40.0 PKR	75,000	3,000,000	
052	Penetapan Hari Sidang			1,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.135-Surabaya II)			1,000,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	40.0 PKR	25,000	1,000,000	
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			11,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			11,700,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.135-Surabaya II)			7,500,000	RM
	- Konsumsi Makan Petugas Pengamanan [2 ORG x 55 KEG]	110.0 OK	25,000	2,750,000	
	- Konsumsi Makan Terdakwa [55 PKR x 1 ORG x 2 KEG]	110.0 OK	25,000	2,750,000	
	- Konsumsi Makan Persidangan di Luar Jam Kerja (Mejelis Hakim, Panitera, Petugas Pengamanan, Terdakwa dan 2 Orang Saksi) [8 ORG x 10 KEG]	80.0 OK	25,000	2,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.135-Surabaya II)			3,000,000	RM
	- Honorarium saksi Ahli	3.0 OK	1,000,000	3,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.135-Surabaya II)			1,200,000	RM
	- Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Ruang Sidang [2 ORG x 4 KEG]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
054	Minutasi/Upaya Hukum			3,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.135-Surabaya II)			3,000,000	RM
	- Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	40.0 PKR	75,000	3,000,000	
055	Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara			9,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(05)
(663301)
Rp. 409,430,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.135-Surabaya II) - Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	40.0 PKR	240,000	9,600,000 9,600,000	RM
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	20.0 Perkara, Berkas Perkara		242,650,000	
1058.QCA.001	Lokasi : KOTA SURABAYA Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	20.0 Perkara		242,650,000	U
051	Sidang di Luar Gedung Pengadilan			242,650,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			242,650,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.135-Surabaya II) - Biaya Uang Kebersihan [2 org x 5 keg]	10.0 Ok	100,000	1,000,000 1,000,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.135-Surabaya II) - Tiket [5 org x 5 keg] - Tranportasi Riil [5 org x 5 keg] - Penginapan [5 org x 4 hr x 5 keg] - Uang Harian [5 org x 5 hr x 5 keg]	25.0 Ok 25.0 Ok 100.0 Oh 125.0 Oh	2,500,000 530,000 984,000 540,000	241,650,000 62,500,000 13,250,000 98,400,000 67,500,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

ANWAR
KOLONEL CHK

RENCANA KEGIATAN
DIPA DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN _ DIPA 05
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Jumlah Biaya	BULAN KEGIATAN											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	409.430.000												
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	409.430.000												
1058.AEA	Koordinasi[Base Line]	75.000.000												
	Lokasi : KOTA SURABAYA													
1058.AEA.001	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	75.000.000												
051	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	75.000.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	75.000.000												
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Tiket [3 org x 4 keg]	24.000.000												
	- Tranportasi Riiil [3 org x 4 keg]	7.560.000												
	- Penginapan [3 org x 2 hr x 4 keg]	24.000.000												
	- Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 keg]	19.440.000												
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	91.780.000												
	Lokasi : KOTA SURABAYA													
1058.BCA.U02	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	60.480.000												
051	Pencatatan Register Perkara Banding	22.400.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	22.400.000												
521211	Belanja Bahan	12.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	12.000.000												
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.400.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Alat Tulis Kantor	10.400.000												
052	Minutasi	4.000.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	4.000.000												
521211	Belanja Bahan	4.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	4.000.000												
053	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	30.080.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	30.080.000												
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.080.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan	30.080.000												
054	Pengiriman Surat Penahanan	4.000.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	4.000.000												
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengiriman Surat Penahanan ke Pengadilan Pengaju dan ke Rumah Tahanan Militer	4.000.000												
1058.BCA.U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	31.300.000												
051	Pendaftaran Berkas Perkara	6.000.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	6.000.000												
521211	Belanja Bahan	3.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	3.000.000												
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Alat Tulis Kantor	3.000.000												
052	Penetapan Hari Sidang	1.000.000												

A	TANPA SUB KOMPONEN	1.000.000												
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	1.000.000												
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	11.700.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	11.700.000												
521211	Belanja Bahan	7.500.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Konsumsi Makan Petugas Pengamanan [2 ORG x 55 KEG]	2.750.000												
	- Konsumsi Makan Terdakwa [55 PKR x 1 ORG x 2 KEG]	2.750.000												
	Konsumsi Makan Persidangan di Luar Jam Kerja (Mejelis Hakim, Panitera, Petugas Pengamanan, Terdakwa dan 2 Orang Saksi) [8 ORG x 10 KEG]	2.000.000												
522151	Belanja Jasa Profesi	3.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Honorarium saksi Ahli	3.000.000												
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Ruang Sidang [2 ORG x 4 KEG]	1.200.000												
054	Minutasi/Upaya Hukum	3.000.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	3.000.000												
521211	Belanja Bahan	3.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	3.000.000												
055	Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	9.600.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	9.600.000												
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.600.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	9.600.000												
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	242.650.000												
	Lokasi : KOTA SURABAYA													
1058.QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	242.650.000												
051	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	242.650.000												
A	TANPA SUB KOMPONEN	242.650.000												
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.000.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Biaya Uang Kebersihan [2 org x 5 keg]	1.000.000												
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	241.650.000												
	(KPPN.135-Surabaya II)													
	- Tiket [5 org x 5 keg]	62.500.000												
	- Tranportasi Riiil [5 org x 5 keg]	13.250.000												
	- Penginapan [5 org x 4 hr x 5 keg]	98.400.000												
	- Uang Harian [5 org x 5 hr x 5 keg]	67.500.000												

Catatan :
1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Sidoarjo, Desember 2023
Pengadlan Militer Tinggi III Surabaya
Kuasa Pengguna Anggaran


ANWAR
KOLONEL CHK